

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Admosudirdjo, P. (1994). Hukum Administrasi Negara: Ghalia Indonesia.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi. 2016. Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.
- Fajlurrahman Jurdi. 2021. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta; Rangkang Education.
- Fajlurrahman Jurdi, 2023, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Kencana.
- E. Utrcht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986).
- Earl P.Strong. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta; Bumi Aksara.
- Ishaq, H. (2022). Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi. Sinar Grafika
- Muji Estiningsih, 2005. Fungsi Pengawasan DPRD, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Manulang, 2004. Dasar-dasar Manajemen, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muchsan, 1992. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljadi, D., Sugianto, R., Hendrick, J. S., & Hartono, K. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.ketiga, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994).
- Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Situmorang, V. M. (1994). Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah.
- Sujamto. 1986. Beberapa pengertian dibidang pengawasan. Jakarta; Balai Pustaka.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode Peneliiian. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Sofyan Sari Harahap. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System). PT Pustaka Quantum.

Jurnal

- Annisa, A. N., Juniar, M. W., Nur, R., & Prasetya, M. R. (2022). Government Supervision Of The Rights Fulfillment Of Housed Workers In The Transition Period. Awang Long Law Review.Ahmad Sodik Sudrajat. Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 7. No. 3 (2010).

- Baihaqi, 2016, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan, UPT Perpustakaan Syiah Kuala Banda Aceh, vol.8, Nomor:1.
- Linelejan, F., Pangemanan, S., & Kimbal, A. (2020). Pengawasan Pemerintah Dalam Pendistribusian Pupuk Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Modoinding). Jurnal Eksekutif.
- Mathar, A. (2015). Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Keluaraga Islam.
- Sudjono, S. (2011). Sistem Distribusi Berbasis Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani. Analisis Kebijakan Pertanian, 9(4).
- Saputra, Y. (2023). Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara. Atikel Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law and Governance Journal.
- Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek. Jakarta: Sinar Grafik.
- Yonnawati, Y. (2022). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Jurnal Hukum Malahayati, 3(1).
- Yanti, H. (2017). Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Skripsi

- Aditama, A. (2016). Analisis Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015).
- Astuti, D. 2018. Motif Kebiasaan Melanggar Peraturan.
- Yoga, P. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 terkait Penetapan Pupuk Bersubsidi selaku
Barang Dalam Pengawasan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Surat Keputusan

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003.

Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 84/D-16/II/2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 142/D-04/IV/2020 Tentang Pembentukan
Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Luwu Timur

Sumber Internet

Saputra, Y. (2023). Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara. Atikel
Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Sumber : <https://ilmuhukum.uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>